

BAB IV PENUTUP

1. Pengaruh penerapan *presidential threshold* terhadap Demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah pengukuran yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kebebasan sipil, kebebasan pers, partisipasi politik, dan sejumlah elemen lainnya. *Presidential threshold* merupakan bagian dari kerangka hukum pemilihan umum dan bisa memiliki dampak terhadap dinamika politik di sebuah negara. Sebagian orang berpendapat bahwa ambang batas yang tinggi dapat membatasi akses partai-partai kecil atau independen ke dalam proses demokratis, sementara yang lain berpendapat bahwa ambang batas tinggi dapat membantu mencegah fragmentasi politik dan mempromosikan stabilitas pemerintahan.

Pengaruh *presidential threshold* dalam sistem Demokrasi bisa mempengaruhi beberapa faktor dalam negara tersebut seperti kebijakan pemerintah, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sementara *presidential threshold* bisa memainkan peran dalam dinamika politik, dampaknya terhadap demokrasi akan sangat kompleks banyak dinilai dari beberapa perspektif. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi terhadap dampak *presidential threshold* pada demokrasi dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan nilai-nilai politik masing-masing individu atau kelompok. Selain itu, perubahan dalam aturan pemilihan atau sistem politik suatu negara tidak selalu memiliki dampak langsung dan segera terhadap demokrasi di Indonesia.

2. Implikasi hukum bahwa *Presidensial Threshold* Presidential Threshold, dalam perspektif kedaulatan rakyat, memainkan peran yang penting dalam proses demokratisasi suatu negara. Kedaulatan rakyat mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan keputusan politik yang penting harus mencerminkan kehendak dan aspirasi mereka. Dalam konteks Presidential Threshold, ambang batas suara atau kursi yang harus dicapai oleh seorang calon presiden sebelum

dapat mencalonkan diri menjadi penting karena mempengaruhi seberapa jauh kekuasaan rakyat dapat diekspresikan dalam pemilihan umum.

Dengan adanya *Presidential Threshold* yang tepat, diharapkan bahwa calon presiden yang mencalonkan diri telah mendapatkan dukungan yang cukup luas dari rakyat atau partai politik yang mewakili kepentingan rakyat. Ini memastikan bahwa pemilihan presiden yang dilakukan merupakan cerminan dari kehendak mayoritas rakyat, yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam implementasinya, pengaturan *Presidential Threshold* juga perlu memperhatikan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat menghambat akses bagi calon presiden alternatif dan mengurangi keragaman pilihan politik. Oleh karena itu, dalam konteks kedaulatan rakyat, penting untuk mencari keseimbangan antara memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang cukup, sambil tetap memperhatikan inklusivitas politik dan representasi yang adil dari berbagai kepentingan rakyat.

Karena sejumlah hak telah dikurangi, termasuk hak partai politik yang berkontestasi dalam pemilu yang terhambat oleh keberadaan ambang batas yang tidak semua partai dapat memenuhinya. Selain itu, pilihan yang dimiliki oleh rakyat akan semakin terbatas karena keberadaan *Presidential Threshold* akan mengurangi variasi opsi dalam proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden.